

Penyelidikan Proyek Pidie-Meulaboh Tak Jelas, GeRAK Bakal Bersurat ke Komisi 3 DPR RI

Category: Hukum

written by Maulya | 21/11/2024



ORINEWS.id – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, bakal mengirim surat ke Komisi 3 DPR RI terkait penanganan kasus dugaan [korupsi](#) peningkatan jalan batas Pidie-Meulaboh pada Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh.

Untuk diketahui, proyek itu dimenangkan oleh PT Gramita Eka Seroja dengan total anggaran Rp 14,7 miliar, yang bersumber pada APBA 2019. Penelusuran di LPSE Aceh, perusahaan tersebut beralamat di Jln Sisingamangaraja, No 16, Drien Rampak, Kabupaten Aceh Barat.

Dimana, Polda Aceh pada tahun 2022 sudah melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Ditreskrimsus Polda Aceh sudah mengirim surat ke Kepala Dinas PUPR Aceh untuk menghadirkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proyek itu.

Ada lima nama yang diminta penyidik kepada Kadis PUPR Aceh untuk hadir menghadap penyidik pada Rabu, 26 Januari 2022.

Lima nama itu yakni Direktur PT Binefa Raya Consult, H, Lab Teknisi PT Binefa Raya Consult, M, Inspector PT Binefa Raya Consult, RS, Chief Inspector PT Binefa Raya Consult, ME dan Direktur PT Gramita Eka Seroja, TMZ.

Dalam surat yang diteken Wadirkrimsus Polda Aceh, AKP Hairajadi, kelimanya diminta hadir ke ruang unit III Subdit/Tipid Korupsi Ditreskrimsus Polda Aceh. Surat dengan perihal permintaan keterangan dan dokumen dengan tebusan Kapolda Aceh, Irwasda Polda Aceh dan Kabid Propam Polda Aceh.

“Sudah hampir tiga tahun kasus ini tapi tidak ada kejelasan, makanya kami akan mengirim surat ke Komisi 3 DPR RI, sebelumnya kami juga sudah bersurat ke Biro Pengawasan dan Penyelidikan (Wassidik) Bareskrim Mabes Polri,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Kamis (21/11/2024).

Alasan GeRAK mengirim surat ke Komisi 3, kata Askhalani, karena mereka merasa perlu ada pengawasan yang lebih mendalam terhadap Mabes Polri terkait kasus tersebut.

Ia berharap Komisi 3 yang membawahi urusan hukum dan keamanan bisa turun tangan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Kata Askhalani, penting untuk ada klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak kepolisian, agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada kesan penanganan kasus yang asal-asalan atau tertutup.

“Dengan adanya supervisi dari Komisi 3, diharapkan bisa mendorong Mabes Polri untuk lebih terbuka dan profesional dalam menangani kasus tersebut khususnya di Polda Aceh,” tegas Askhalani.

Seharusnya, kata Askhalani, Polda Aceh harus mengungkap hingga tuntas kasus yang sudah merugikan keuangan negara. Pasalnya sejumlah ruas jalan yang sebelumnya dibangun melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah tidak lagi bisa dipergunakan dengan baik sudah sangat rusak dan hancur.

“Masyarakat berharap dapat menikmati fasilitas yang dapat mendukung aktivitas mereka, namun kenyataannya justru mereka harus menghadapi kerusakan jalan yang seharusnya sudah diperbaiki,” tegas Askhalani.

Menurut Askhalani sangat disayangkan jika infrastruktur yang telah dibangun dengan dana yang besar justru tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan malah merugikan mereka karena kondisi jalan yang rusak.

“Kasus seperti ini mengingatkan kita pada pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara, agar proyek-proyek yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak justru menjadi beban. Diperlukan tindakan tegas untuk memastikan dana yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan,” kata Askhalani.